

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke- : 04  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 13 April 2016  
Waktu : Pukul 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : - RUU Prioritas Tahun 2016;  
- Evaluasi Kinerja dan Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016; dan  
- Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016
- Ketua Rapat : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 39 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:
1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);
  2. Prof.Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Sekretaris Jenderal);
  3. Andha Fauzie M, Ak.,M.S.I.S (Inspektur Jenderal);
  4. Narmoko Prasmadji SH., M.A. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)
  5. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
  6. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
  7. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
  8. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan);
  9. Ir. Rifky Efendi Hardijanto (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); dan
  10. Dr.Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian)
- beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RUU Prioritas Tahun 2016, Evaluasi Kinerja dan Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016, dan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah untuk membahas lebih lanjut Prolegnas bidang kelautan dan perikanan menjadi RUU Prioritas yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang pembahasannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 sebesar Rp679.074.748.000,- atau 6,25% dari Pagu APBN Tahun 2016 setelah penghematan sebesar Rp10.871.169.938.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih meningkatkan serapan pada APBN Tahun 2016 terutama untuk program peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas penghematan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sebesar Rp2.930.022.793.000,- dari Pagu DIPA Tahun 2016 sebesar Rp13.801.192.731.000,-, sehingga Pagu APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 menjadi sebesar Rp10.871.169.938.000,- yang akan ditetapkan dalam APBN-P Tahun 2016.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementarian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, baik yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud.
6. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagius spp*) dengan menerima masukan dari masyarakat khususnya nelayan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan lainnya.
7. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses Pembangunan Proyek Reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**SUSI PUDJIASTUTI**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI.**

**A-419**

